



Kemitraan Pembangunan Bersama Sektor Swasta

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana
Dalam Upaya Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat



Laporan disusun oleh Tim dari PT Asuransi MAIPARK Indonesia, GIZ melalui program *Decentralisation as Contribution to Good Governance (DeCGG)* dan *Project for Training Education and Consulting for Tsunami Early Warning System (PROTECTS)*.

Dipublikasikan oleh:
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Menara BCA lantai 46
Jalan MH Thamrin No. 1
Jakarta Pusat
T +62 21 235 87 121
F +62 21 235 87 120

Internet:
www.giz.de

Penanggung jawab iDPP:
Dr. Manfred Poppe
Fauzia Kartadinata

Mitra iDPP:
PT. Asuransi MAIPARK Indonesia
Multivision Tower, lantai 8
Jalan Kuningan Mulia Blok 9B
Jakarta Selatan
T +62 21 293 80 088
F +62 21 293 80 089

Jakarta, 2013

A. PENDAHULUAN

Gempabumi dan tsunami dapat mengakibatkan kerugian pada perekonomian negara, seperti kerusakan infrastruktur dan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa.

Situasi ini akan diperburuk lagi karena

- rendahnya kesadaran masyarakat akan risiko bencana,
- rendahnya pemahaman kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana,
- kurangnya informasi/peringatan dini yang menyebabkan ketidaksiapan.

Pemerintah dan masyarakat masih belum siap, sebagian besar karena ketidaktahuan atau belum menyadari pengurangan risiko bencana sebagai prioritas dalam mengatasi situasi darurat. Tanggungjawab dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah semata, namun juga warga masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.

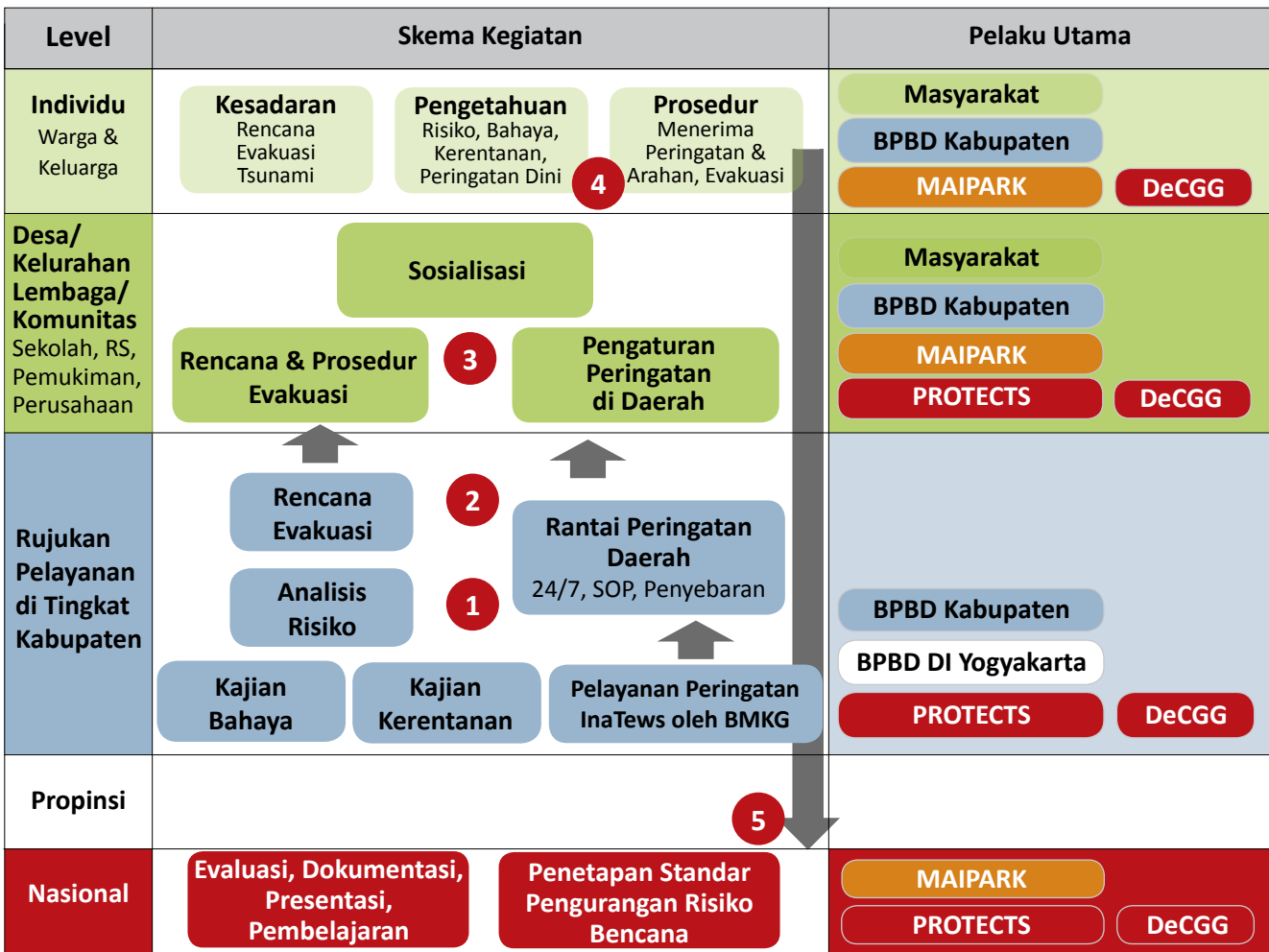
KERJASAMA

GIZ melalui program *Decentralisation as Contribution to Good Governance* (DeCGG) bekerjasama dengan PT. Asuransi MAIPARK Indonesia di dalam *integrated Development Partnership with the Private Sector* (iDPP) yang didukung sepenuhnya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DI Yogyakarta, BPBD Kabupaten Gunungkidul dan *Project for Training Education and Consulting for Tsunami Early Warning System* (PROTECTS) melakukan kegiatan pengembangan kapasitas pengurangan risiko bencana dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di kawasan rawan bencana tsunami di wilayah pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul. Kemitraan berhasil diselesaikan dalam waktu 9 bulan.

Dalam kerjasama ini pihak swasta diwakili PT. Asuransi MAIPARK Indonesia, yang merupakan perusahaan asuransi risiko khusus yang dimiliki oleh seluruh perusahaan asuransi umum dan reasuransi yang ada di Indonesia, yang menyediakan perlindungan reasuransi untuk gempa bumi, letusan gunung berapi dan risiko tsunami. Melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) nya, MAIPARK terus berperan aktif dalam usaha penanggulangan bencana, seperti penyuluhan sadar bencana dan pengenalan asuransi bencana bagi masyarakat.

Kemitraan Pembangunan (iDPP) Bersama Sektor Swasta merupakan program GIZ yang kontribusi langsung mencapai tujuan. Manfaat dari kerjasama ini adalah memberikan sinergi dalam sumber daya yang dimiliki pihak-pihak terkait, masuknya kekuatan inovasi dan kemampuan usaha sektor swasta sehingga dapat menciptakan citra (*brand recognition*) yang baik bagi sektor swasta, memberi akses ke berbagai jaringan yang tidak terhubung oleh lembaga, dan dapat sebagai pemenuhan CSR (*Corporate Social Responsibility*) bagi sektor swasta.

PROSES KEGIATAN



Alur bagan dimulai dari tingkatan berwarna biru, keluaran dari tingkatan berwarna biru akan menjadi masukan untuk tingkatan berikutnya.

Kebutuhan pengetahuan akan risiko bencana tsunami diperlukan masyarakat, khususnya masyarakat di kawasan rawan bencana tsunami. Tindakan tepat yang dilakukan individu tergantung dari kesadaran dan pemahaman kesiapsiagaan dalam upaya pengurangan risiko bencana tsunami, pemahaman peringatan dini dan prosedur evakuasi di wilayahnya.

Di tingkat Kabupaten, awal proses kegiatan ini dijalankan oleh Kelompok Kerja* (Pokja) yang dipimpin oleh BPBD Kabupaten Gunungkidul. Dalam menjalankan tugasnya, Pokja mendapatkan penguatan kapasitas bantuan teknis secara terstruktur dalam bentuk rangkaian lima workshop teknis serta pelatihan perencanaan evakuasi. Salah satu agenda dalam workshop adalah menyepakati dimulainya proses perencanaan evakuasi di tingkat kabupaten.

Serangkaian aktivitas dalam tahapan yang telah membuahkan hasil kegiatan/keluaran diuraikan dibawah ini. Membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana perlu menyiapkan pemerintah daerah terlebih dahulu yang berperan dalam rantai peringatan sebagai penyedia referensi dalam bentuk rencana evakuasi Kabupaten/Kota. Rencana evakuasi disusun berdasarkan

- TAHAP 1 :**
 - Kajian Bahaya
 - Analisis Risiko

- TAHAP 2 :**
 - Penyiapan Rantai Peringatan Dini Tsunami Daerah dan pengaturan penyebaran peringatan
 - Penyusunan Rencana Evakuasi tingkat Kabupaten sebagai rujukan perencanaan evakuasi di tingkat lebih kecil

- TAHAP 3 :**
 - Pembentukan Fasilitator Tsunami. Fasilitator Tsunami dilatih untuk memfasilitasi penyusunan rencana-rencana evakuasi dan pengaturan peringatan di tingkat desa atau lembaga
 - Penyusunan Rencana Evakuasi di tingkat desa dan pengaturan penyebaran peringatan
 - Penyiapan Peta dan Prosedur Evakuasi serta Rambu-rambu Evakuasi
 - Pengadaan Sirine sebagai alat penyebaran peringatan di tingkat individu
 - Penyusunan strategi Sosialisasi
 - Pembentukan Kader Siaga Tsunami yang merupakan perwakilan masyarakat yang potensial, tugasnya adalah menyebarkan rencana dan strategi evakuasi yang telah disepakati di tingkat individu melalui kegiatan Sosialisasi

- TAHAP 4 :**
 - Pelaksanaan kegiatan untuk masyarakat di dusun dan wilayah pesisir pantai
 - Pelaksanaan Pelatihan Evakuasi Tsunami (*drill*)

- TAHAP 5 :**
 - Berbagi pengalaman pencapaian kegiatan di daerah sebagai masukan kepada pembuat kebijakan di tingkat Nasional dalam bidang pengurangan risiko bencana

* Kelompok Kerja (Pokja) mewakili berbagai institusi Pemerintah (BPBD, Bappeda, Dinas Sosial dll) serta organisasi masyarakat (SAR, PMI dll).

B. PENCAPAIAN KERJASAMA

PAPAN PETA EVAKUASI TSUNAMI - RAMBU EVAKUASI

Sarana informasi publik berupa papan peta dan prosedur evakuasi berikut rambu-rambunya telah terpasang di 7 pantai Kabupaten Gunungkidul. Melalui sarana informasi tersebut masyarakat dapat mengetahui daerah aman, rute evakuasi dan prosedur evakuasi setempat. Pembuatan peta dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari perwakilan masyarakat dan dipimpin oleh BPBD Kabupaten Gunungkidul. Data lokasi pemasangan papan Peta Evakuasi Tsunami (+ Prosedur) beserta rambu evakuasi di Kabupaten Gunungkidul:

Lokasi	Jumlah Papan Peta + Prosedur Evakuasi	Jumlah Rambu Evakuasi
Pantai Baron	1	11
Pantai Krakal	1	9
Pantai Kukup	1	2
Pantai Indrayanti	1	4
Pantai Sundak	1	1
Pantai Sadeng	1	-
Pantai Siung	1	-
7 Pantai	7 Papan Peta + Prosedur Evakuasi	27 Rambu Evakuasi

RANTAI PERINGATAN DAERAH

Dua buah sirine sebagai peringatan di tingkat komunitas/masyarakat terpasang di Pantai Baron dan Krakal di Kabupaten Gunungkidul.

SOSIALISASI

Peningkatan pemahaman kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat akan risiko bencana dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi di dusun-dusun dan di wilayah pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul. Dalam sosialisasi warga diberi informasi mengenai daerah aman, rute evakuasi dan prosedur evakuasi untuk daerahnya masing-masing. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

Di Kabupaten Gunungkidul kegiatan ini telah diikuti:

- 227 Murid SMP Tanjungsari, Pantai Baron di Kabupaten Gunungkidul. Murid diberi pelatihan P3K dan latihan evakuasi. Latihan evakuasi terdiri dari pelajaran teori dan simulasi di dalam kelas.
- 752 warga dari dusun-dusun dan 12 titik pesisir pantai Gunungkidul antara lain Gesing, Ngrenehan, Baron, Sundak, Sepanjang, Drini, Krakal Barat dan Timur, Indrayati, Siung, Wediombo, Sadeng dan Kukup. Selain warga dusun sosialisasi ini diikuti juga oleh Kelompok Nelayan, Kelompok Sadar Wisata, Tokoh Masyarakat Pesisir, SAR.

Salah satu cara penyampaian pesan kesiapsiagaan dilakukan melalui kesenian daerah yaitu pagelaran wayang kulit. Pagelaran wayang kulit sebagai tanda berakhirnya proyek iDPP di Kabupaten Gunungkidul dilakukan di Pantai Baron. Pesan-pesan kesiapsiagaan disisipkan dalam cerita wayang sehingga dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat yang datang dan antusias menyaksikan pagelaran tersebut.

LATIHAN EVAKUASI TSUNAMI (*DRILL*)

Atas dukungan BPBD Propinsi DI Yogyakarta dan organisasi terkait dalam iDPP, BPBD Kabupaten Gunungkidul telah mengkoordinasi pelatihan evakuasi tsunami (*drill*) yang diikuti 333 warga dan melibatkan aparat Pemerintah Kabupaten dan Desa, nelayan, pedagang dan warga Pantai Krakal Kabupaten Gunungkidul. Pelatihan ini menambah pemahaman kesiapsiagaan dan kesadaran warga akan prosedur evakuasi setempat.

KETERLIBATAN TUAN RUMAH

Dukungan sepenuhnya dari pihak BPBD Propinsi DI Yogyakarta, selain berupa dana juga mendorong BPBD Kabupaten lainnya di DI Yogyakarta melaksanakan kegiatan yang sama.

BPBD Kabupaten Gunungkidul mendapat pengalaman sebagai penyelenggara pelatihan Kader dan keterlibatan langsung saat kegiatan sosialisasi.

Partisipasi masyarakat Kabupaten Gunungkidul dalam kegiatan ini dengan mengirim perwakilannya untuk dapat dilatih menjadi Kader Siaga Tsunami. Kader ini nantinya dapat meneruskan sosialisasi secara berkala di daerahnya.

USULAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BENCANA TSUNAMI

Merujuk rancangan *white paper* yang disusun Desember 2012 tentang SPM bencana dari Kementerian Dalam Negeri dan masih dikembangkan sampai sekarang, beberapa usulan disampaikan untuk dapat melengkapi bentuk-bentuk pelayanan dasar dan jenis-jenis kebutuhan dasar bagi suatu daerah terkait membangun kesiapsiagaan tsunami.

Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan 5 jenis pelayanan dasar dan alasan pelayanan dibutuhkan:

5 jenis pelayanan dasar	Alasan Pelayanan perlu disediakan oleh BPBD ke Masyarakat
Kajian Bahaya	Penyediaan Peta Bahaya resmi di tingkat Kabupaten berdasarkan pengetahuan terbaru: membuat warga tahu (dengan baik) seluruh daerah yang berpotensi besar terdampak gelombang tsunami (daerah inundasi) dan kemungkinan waktu kedatangan (ETA).
Analisa Risiko	Pengkajian risiko Tsunami di tingkat Kabupaten: membuat warga memahami risiko yang mereka hadapi. Hal ini termasuk identifikasi kapasitas dan kerentanan, dan juga daerah berisiko tinggi.
Rantai Peringatan Daerah Pusat 24/7, SOP, Diseminasi	Pembuatan pelayanan peringatan tsunami yang berfungsi selama 24/7 Tsunami Warning: membuat warga dapat menerima peringatan dan arahan secara tepat waktu. Hal ini juga termasuk penyediaan alat-alat komunikasi publik seperti sirine atau alat-alat komunikasi lain jika diperlukan.
Rencana Evakuasi	Pembuatan Rencana Evakuasi Tsunami untuk seluruh daerah rawan di Kabupaten: membuat warga tahu tentang bahaya yang sedang mereka hadapi, dan tahu dimana daerah zona bahaya dan zona aman, rute evakuasi, dan prosedur evakuasi daerah. Hal ini Juga termasuk penyediaan sarana informasi publik seperti rambu-rambu evakuasi dan billboard peta dan prosedur evakuasi.
Sosialisasi	Pendidikan Publik: membangun dan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan warga tentang kesiapsiagaan tsunami dan prosedur evakuasi. Persiapan & pelaksanaan Pelatihan Evakuasi Tsunami (<i>Drill</i>): sehingga warga menjadi paham dengan prosedur evakuasi setempat.

Analisa kriteria kebutuhan dasar terkait Standar Pelayanan Minimum adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kebutuhan Dasar	Kriteria		Kewenangan	
	Jenis Bencana Tsunami	Kebutuhan dasar	Tidak bisa dipenuhi sendiri	Propinsi	Kabupaten
1.	Kajian Bahaya	√	√	√	√
2.	Informasi tentang kawasan yang potensial terkena bencana tsunami	√	√	√	√
3.	Analisa Risiko	√	√	√	√
4.	Rencana Evakuasi	√	√		√
5.	Informasi dan rambu-rambu jalur evakuasi apabila ada ancaman tsunami	√	√		√
6.	Penyediaan tempat evakuasi apabila ada ancaman tsunami	√	√		√
7.	Rantai Peringatan Daerah 24/7, SOP, diseminasi	√	√		√
8.	Informasi atau sirine tentang adanya potensi akan terjadinya tsunami selambat-lambatnya 2 jam dari waktu perkiraan terjadinya tsunami	√	√	√	
9.	Sosialisasi	√	√		√
10.	Simulasi evakuasi apabila terjadi tsunami	√	√	√	√

- Usulan tambahan untuk Standar Pelayanan Minimum dari hasil pembelajaran di daerah
- Usulan Standar Pelayanan Minimum Kementerian Dalam Negeri

C. PENUTUP

Kerjasama ini memberikan penggarapan, penyebaran dan penerapan pengetahuan pengurangan risiko bencana terkait dengan praktik yang baik seperti pembelajaran bagaimana membangun kapasitas baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat sipil dalam pengurangan risiko bencana, bagaimana menghasilkan rencana evakuasi tingkat desa/lembaga dilengkapi dengan papan-papan peta evakuasi dan rambu-rambu evakuasi yang terpasang di sejumlah pantai, konsep rantai peringatan yang dilengkapi dengan sirine lokal, serta sosialisasi kepada kelompok masyarakat sasaran.

Pelaksanaan kemitraan selain memberikan sejumlah pembelajaran baik dari pendekatan pelaksanaan, pengelolaan kemitraan, maupun hasil kegiatannya yang terukur juga dapat dijadikan sebagai contoh untuk direplikasi di daerah lain di Indonesia. MAIPARK telah memberikan contoh dalam mengimplementasikan CSR, mengharapakan sektor swasta lainnya tidak hanya terbatas pada industri asuransi dapat mencontoh dan termotivasi untuk turut serta berkontribusi bagi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Pembelajaran dari kemitraan ini memberi pengalaman-pengalaman lain, di mana dasar-dasar pembelajaran dari pengalaman ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian atau masukan nyata untuk peninjauan kebijakan terkait pemberian pelayanan minimum dalam kesiapsiagaan tsunami dan memperlihatkan sinergi kerjasama antara masyarakat, pihak swasta dan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

DOKUMENTASI FOTO

PENANDATANGANAN KONTRAK KERJASAMA iDPP



PERSIAPAN KEGIATAN MELALUI BEBERAPA PELATIHAN DAN WORKSHOP



PETA DAN PROSEDUR EVAKUASI

PETA EVAKUASI TSUNAMI PANTAI KRAKAL KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LEGENDA

Pantai	Titik Aman
Arah Evakuasi	Tempat Berkumpul
Sirene	Batas Desa
Zona Bahaya	Jalur Evakuasi
Zona Aman 50m	Jalan
Zona Aman 75m	Sekolah
Zona Aman 100m	Puskesmas
Zona Aman >100m	Masjid
Pemukiman	Anca Di Sini
Laut	

DEWAT OLEH:

DISUKUNG OLEH:

Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi:

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**
Komplek Bangsal Sorek, Paga Wanasari
Telp: (0274) 34011 Email: bpd@gunungkidul.go.id
GUNUNGKIDUL, NOVEMBER 2012

PROSEDUR EVAKUASI

- a. Bila anda **MERASAKAN GEMPA BUMI** jangan panik.
 - Segeralah keluar dari bangunan ke tempat lapang.
 - **JAUHI PANTAI**, muara dan bantaran sungai beberapa ratus meter.
- b. Dengarkan dan **IKUTI ARAHAN** resmi dari **PUSDALOPS BPBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL** melalui pengeras suara, atau dari Petugas SAR Pantai / Pos Wisata.
- c. Bila **MENDENGAR SIRINE** panjang (3 menit), **SEGERALAH EVAKUASI**.
- d. **SAAT EVAKUASI**, anda dihimbau untuk:
 - **BERJALAN KAKI** cepat **KETEMPAT TINGGI** menuju Tempat Berkumpul atau ke Tempat Aman terdekat dengan mengikuti rambu-rambu evakuasi.
 - Tidak mencoba mencari anggota keluarga atau teman.
 - Membantu warga di dekat yang memerlukan pertolongan.
 - Membawa barang paling berharga saja.

Bila anda sedang berada

Di Lokasi	Tempat Aman	Tempat Berkumpul
Pantai Krakal Barat	• Perumahan • Pos Wisata • Pos	• Perumahan • Bruno I
Pantai Krakal Timur	• Ladang Mekar • Group	• SD Srikarya



RAMBU EVAKUASI

Rambu Evakuasi yang terpasang di Kabupaten Gunungkidul



RANTAI PERINGATAN DAERAH

Pengeras suara/sirine yang terpasang di Pantai Baron dan Pantai Krakal, Kabupaten Gunungkidul.



Pantai Baron



Pantai Krakal

SOSIALISASI

Sosialisasi yang dilakukan di SMP Tanjungsari, Pantai Baron Kabupaten Gunungkidul.



Sosialisasi yang dilakukan di dusun-dusun dan pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul.



Sosialisasi di Pantai Drini



Sosialisasi di Wediombo



Sosialisasi di Pantai Krakal



Sosialisasi di Pantai Siung

LATIHAN EVAKUASI TSUNAMI (*DRILL*)

Latihan evakuasi dilakukan di Pantai Krakal Kabupaten Gunungkidul



BERBAGI PENGALAMAN KERJASAMA PEMBANGUNAN BERSAMA SEKTOR SWASTA





Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Menara BCA lantai 46
Jalan MH Thamrin No. 1
Jakarta Pusat
T +62 21 235 87 121
F +62 21 235 87 120
I www.giz.de